

**TESIS**  
**OPTIMALISASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI MASA PANDEMI COVID 19**

Di Susun Oleh :

NAMA : YUDHI ARVIANSYAH  
NPM : 1863002142  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar  
Gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2022

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

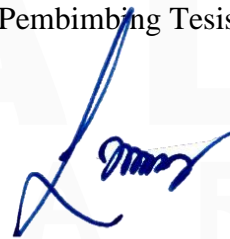
**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Yudhi Arviansyah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1863002142  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tugas Akhir/Tesis : Optimalisasi Penyusunan Laporan  
Keuangan Kementerian Hukum dan  
HAM Di Masa Pandemi Covid 19

Diterima dan disetujui untuk  
dipertahankan

Jakarta, 21 Juni 2022

Pembimbing Tesis



( Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA )

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

NAMA : YUDHI ARVIANSYAH  
NOMOR POKOK : 1863002142  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN  
NEGARA  
JUDUL TUGAS AKHIR/TESIS : OPTIMALISASI PENYUSUNAN  
LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM DI MASA PANDEMI  
COVID 19

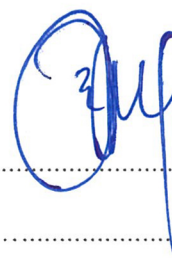
Telah mempertahankan tesis dihadapan tim penguji tesis  
Program Magister Terapan  
Politeknik STIA LAN Jakarta, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Juni 2022  
Pukul : 14.30 WIB

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**TIM PENGUJI TESIS:**

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, M.Si .....  
Sekretaris : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA .....  
Pembimbing Tesis /Anggota : Prof. DR. Nurliah Nurdin, MA .....  
Anggota : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si .....



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudhi Arviansyah  
NPM : 1863002142  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM di Masa Pandemi Covid 19 merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari Penelitian Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 28 Juni 2022

Peneliti,  
Yudhi Arviansyah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga Tesis dengan judul “Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM di Masa Pandemi Covid 19” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr. A.P) pada Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti memberikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang juga sekaligus dosen pengajar dan dosen pembimbing peneliti yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan tesis ini;
2. Seluruh Dewan Penguji mulai dari sidang proposal tesis, seminar hasil penelitian tesis dan sidang akhir tesis, yakni : Dr. Asropi, M.Si, Dr. Edy Sutrisno, M.Si, Dr. Mala Sondang Silitonga, MA dan Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si yang telah banyak memberikan saran, pendapat dan pemikirannya dalam penyusunan tesis saat Seminar Proposal, Seminar Hasil Tesis dan Ujian Tesis;
3. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Wisnu Nugroho Dewanto, S.E, M.H atas ijin dan dukungannya kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini;
4. Dosen-Dosen Program Magister Administrasi Pembangunan Negara khususnya Dosen Manajemen Keuangan Negara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dalam mendalami Ilmu Administrasi, serta semua civitas akademis Politeknik STIA LAN Jakarta atas dukungan dan bantuannya;
5. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Anna Ernita, S.E, M.Si yang telah memberikan dukungan dan idenya dalam penyusunan tesis ini di tengah kesibukan menjalankan tugas;
6. Bapak dan Ibu Sub Koordinator Wilayah Eni Fitriah, M.Si, Anggra Waskito, SE, Meidian Hariswandi, M.Si dan Rekan kerja pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Kementrian Hukum dan HAM atas dukungan dan bantuannya;
7. Sahabat saya Hariadi Setyo Nugroho, M.Si dan Zuniar Veriyansyah, SH yang telah memberikan dukungan dan idenya dalam penyusunan tesis ini;
8. Seluruh Narasumber yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyusunan tesis;
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Terapan Manajemen Keuangan Negara Angkatan Tahun 2018 yang selalu kompak sampai akhir semester, walaupun semester akhirnya berbeda;
10. Orang tua, Mertua serta Adik dan semuanya yang telah memberikan dukungan & doanya;

11. Istri saya Ririn Adriati, SE, atas segala motivasi, perhatian, doa serta kesabaran dalam mendukung terselesaikannya pendidikan magister ini;
12. Seluruh Staf dan Sekretariat bidang akademik Politeknik STIA LAN Jakarta terutama Ibu Mega Merdeka Lubis, Ibu Fida Faridanti dan Mba Celia yang telah dengan sangat sabar dan banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian program studi peneliti;
13. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu;

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yg ditinjau, Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan pengembangan lanjut agar lebih bermanfaat. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan sebagai masukan bagi Peneliti untuk penelitian dan Penelitian karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, Peneliti berharap Tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untk pengembangan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Jakarta, 28 Juni 2022

Yudhi Arviansyah

## ABSTRAK

### **Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM di Masa Pandemi Covid-19**

Yudhi Arviansyah, Nurliah Nurdin

[yudhirtiga@gmail.com](mailto:yudhirtiga@gmail.com)

Politeknik STIA LAN

Jakarta

Pandemi Covid 19 menimbulkan beberapa risiko bagi Kementerian/ Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa optimalisasi penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM dimasa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan teori manajemen . Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara kepada 11 informan, observasi dan telaah dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi optimalisasi penyusunan laporan dimasa Pandemi Covid-19 karena dalam situasi apapun, pemerintah wajib menyampaikan Laporan Keuangan demi mempertahankan kepercayaan atas pengelolaan keuangan negara, adaptasi dengan cara kerja WFH termasuk penggunaan teknologi informasi, keterbatasan waktu dari Kementerian keuangan dan beban kerja personil, penyesuaian terhadap kebijakan eksternal penyusunan LK dari Kementerian keuangan, kurangnya pemahaman bisnis proses dan transfer knowledge. Oleh sebab itu, rekomendasi yang diberikan dalam upaya optimalisasi penyusunan laporan Kementerian Hukum dan HAM dimasa dan setelah Pandemi Covid-19 diantaranya dengan perkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Entitas Akuntansi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan tingkatkan pemahaman terkait bisnis proses, kebijakan eksternal kementerian Keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi juga memperbaharui kebijakan akuntansi berbasis akrual dengan perlakuan akuntansi berdasarkan dengan kondisi terkini.

Kata kunci: laporan keuangan; pandemi Covid -19; pengendalian intern; sistem informasi akuntansi

## ABSTRACT

### *Optimizing the Preparation of Financial Report of the Ministry of Law and Human Rights during the Covid-19 Pandemic*

*Yudhi Arviansyah, Nurliah Nurdin*

*[yudhirtiga@gmail.com](mailto:yudhirtiga@gmail.com)*

*Polytechnics of National Institute of Public Administration  
Jakarta, Indonesia*

*The COVID-19 pandemic poses several risks for Ministries/Institutions in carrying out their duties and functions, including in the preparation of financial reports. This study aims to analyze the optimization of the preparation of the financial reports of the Ministry of Law and Human Rights during the Covid-19 pandemic by using a management theory approach. The method used is a qualitative research method with a case study approach. Data was collected through interviews with 11 informants, observation and document review.*

*The results of this study show the urgency of optimizing the preparation of reports during the Covid-19 Pandemic because in any situation, the government is obliged to submit Financial Reports in order to maintain trust in the management of state finances, adaptation to the workings of WFH including the use of information technology, time constraints from the Ministry of finance and the workload of personnel. , adjustments to external policies for the preparation of LK from the Ministry of finance, lack of understanding of business processes and knowledge transfer. Therefore, the recommendations given in an effort to optimize the preparation of reports from the Ministry of Law and Human Rights during and after the Covid-19 Pandemic include strengthening coordination and communication with all Accounting Entities within the Ministry of Law and Human Rights, and increasing understanding related to business processes, external policies of the Ministry of Finance. and the use of information technology also updates accrual based accounting policies with accounting treatment based on current conditions*

*Keywords: financial report; the Covid-19 pandemic; internal control; accounting information system.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
<b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN</b> .....	1
A Latar Belakang.....	1
B Identifikasi Masalah .....	11
C Rumusan Permasalahan .....	12
D Tujuan Penelitian .....	12
E Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A Penelitian Terdahulu .....	14
B Tinjauan Kebijakan dan Teoritis .....	27
B.1 Tinjauan Kebijakan.....	27
B.1.1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.....	27
B.1.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga.....	28
B.1.3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang	

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat.....	29
B.1.4 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan HAM.....	30
B.1.5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/Pmk.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.....	31
B.2 Tinjauan teoritis.....	32
B.2.1 Definisi Optimalisasi.....	32
B.2.2 Laporan Keuangan.....	33
C Teori Manajemen.....	36
D Kerangka Berpikir.....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	46
A Metode Penelitian.....	46
B Teknik Pengumpulan Data.....	47
C Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	50
D Instrumen Penelitian.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	53
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B Analisis Data.....	55
B.1 Penyebab Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	55
B.1.1 Perencanaan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	55
B.1.2 Pengorganisasian dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	62
B.1.3 Pelaksanaan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	72
B.1.4 Pengawasan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	

Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	87
B.2 Solusi terkait Penyusunan Laporan Keuangan	
Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	98
B.2.1 Perencanaan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	
Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	98
B.2.2 Pengorganisasian dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	100
B.2.3 Pelaksanaan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	101
B.2.4 Pengawasan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham di Masa Pandemi Covid-19.....	106
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	109
A Simpuln.....	109
B Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	123

STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Temuan Pemeriksaan SPI oleh BPK RI Pada LKPP dan LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019-2020.....	6
Tabel 1.2	Profil Kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Dari E-Rekon LK Kementerian Keuangan.....	8
Tabel 2.1	Tabel Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1	Linimasa Penelitian.....	47
Tabel 3.2	Informan Penelitian.....	49
Tabel 4.1	SOP Aklap dalam Pembuatan Pedoman dan Kebijakan Akuntansi.....	56
Tabel 4.2	SOP Aklap dalam Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan.....	63
Tabel 4.3	SOP Aklap dalam Penyusunan Laporan Keuangan.....	73
Tabel 4.4	Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019-2021 (Dalam Rupiah).....	86
Tabel 4.5	SOP Aklap dalam Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan.....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Sebaran Kasus Covid-19 Pada Pegawai Kumham.....	2
Gambar 1.2	Rekapitulasi Jumlah Temuan Pemeriksaan BPK RI Pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 – 2020.....	5
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	45
Gambar 3.3	Model Analisa Data.....	50
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kemenkumham .....	53

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara .....	126
Pedoman Observasi .....	133
Pedoman Telaah Dokumen .....	134



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawas Internal Pemerintah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BMN	Barang Milik Negara
CALK	Catatan Atas Laporan Keuangan
GL	General Ledger
HAM	Hak Asasi Manusia
IKU	Indikator Kinerja Utama
K/L	Kementerian Negara/Lembaga
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	Laporan Hasil Reviu
LK	Laporan Keuangan
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
ORTA	Organisasi dan Tata Kerja
PIPK	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
SAI	Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

SDM	Sumber Daya Manusia
SIMAK	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
SOP	Standard Operating Procedure
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPI	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
TDK	Transaksi Dalam Konfirmasi
UAKPA	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
UAPPA-EI	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
UAPPA-W	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
WFH	Work From Home
WGA	Whole of Government Accounts
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA

# BAB I

## PERMASALAHAN PENELITIAN

### A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan dan memaksa seluruh negara di dunia berubah. Dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi sangat luar biasa. Pandemi Covid 19 menimbulkan beberapa risiko bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk dalam penyusunan laporan keuangan.<sup>1</sup>

Penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) di tahun 2020 akan menjadi tantangan berat di tengah kondisi pandemi Covid-19. Apalagi, respon kebijakan pemerintah cukup luar biasa melalui perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.<sup>2</sup> Pemerintah dituntut dapat mengelola keuangan negara secara cepat, transparan dan akuntabel, dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan walaupun dalam situasi yang tak mudah akibat pandemi Covid 19. Dalam situasi apapun, pemerintah wajib menyampaikan Laporan Keuangan demi mempertahankan kepercayaan atas pengelolaan keuangan negara. Penyebaran global Covid-19 dalam tempo singkat telah menyebabkan hampir setiap negara ke dalam resesi global<sup>3</sup>. Kondisi pandemi tersebut secara langsung mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi sehingga beberapa lembaga internasional memprediksi ekonomi global mengalami resesi.<sup>4</sup>

Situasi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) mulai menyerang Indonesia pada Februari 2020 dan berlanjut hingga saat ini, Kementerian Hukum

---

<sup>1</sup><https://economy.okezone.com/read/2021/02/04/320/2356379/bpk-sebut-covid-19-timbulkan-risiko-penyusunan-laporan-keuangan>

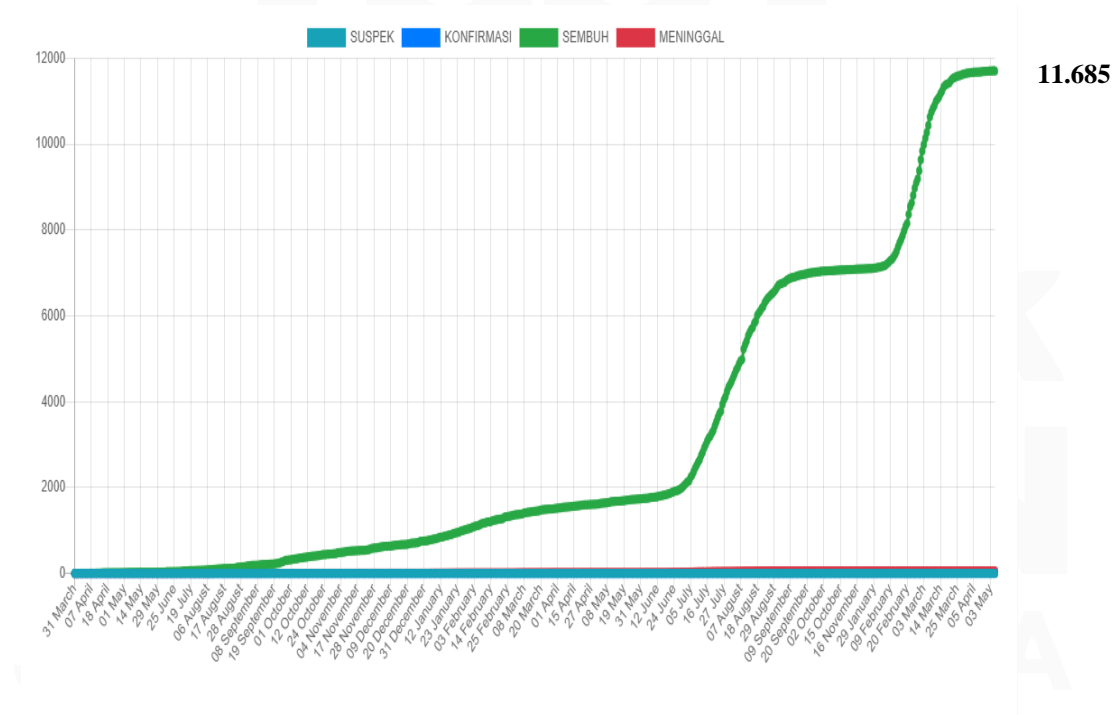
<sup>2</sup> <https://www.merdeka.com/uang/ada-pandemi-sri-mulyani-minta-laporan-keuangan-tetap-transparan-dan-akuntabel.html>

<sup>3</sup> McKibbin, W. and Fernando, R. (2020), The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios (No. 2020-19), Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Crawford School of Public Policy, The Australian National University.

<sup>4</sup> resesi (Kementerian Keuangan. (2020). APBN Kita, Kinerja dan Fakta, April 2020: Menjaga dan Mengelola #Uangkita ditengah tekanan pandemi COVID-19. Jakarta: Kementerian Keuangan.).

dan HAM menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan awal tahun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, bekerja dari rumah (WFH), koordinasi secara online untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas juga mengharuskan menyesuaikan program dan anggaran. Berikut sebaran Covid 19 Pada Pegawai Kementerian Hukum dan HAM :

**Gambar 1.1**  
**Grafik Sebaran Kasus Covid-19 Pada Pegawai Kumham**



Sumber : <https://covid19.kemenumham.go.id/>

Pantauan Kasus harian ASN Kementerian Hukum dan HAM yang diakses pada tanggal 4 Januari 2022 melalui Web Pantau Covid Kemenkumham yang

terkonfirmasi Covid 19 berjumlah 11.748 Pegawai. Yang sudah sembuh berjumlah 11.685 Pegawai dan 63 Pegawai yang meninggal dunia.

Mempertimbangkan fakta-fakta ini, ada banyak diskusi tentang pedoman pelaporan potensial untuk periode pandemi COVID-19 ini karena ada banyak ketidakpastian tentang kinerja ekonomi secara keseluruhan, operasi bisnis, pendapatan masa depan, dan banyak lagi yang terkait langsung dengan laporan keuangan. Peneliti melakukan beberapa riset secara global yang di dapat dari jurnal maupun media berita terkait bagaimana pelaporan keuangan dimasa pandemi negara-negara berikut ini:

Untuk gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak COVID-19 dan kesiapan pemerintah Amerika Serikat melalui Bank Dunia untuk merespons, laporan keuangan akuntansi akrual pembuat kebijakan perlu mengambil tindakan segera setelah merebaknya virus corona, mereka perlu mendapat informasi yang baik tentang posisi keuangan pemerintah. Dalam keadaan normal, laporan keuangan yang telah diaudit tahun sebelumnya harus tiba tepat waktu untuk dipertimbangkan ketika memutuskan anggaran untuk tahun berikutnya. Di masa yang tidak biasa ini, informasi keuangan terkini bahkan lebih penting. Hal ini membuat persiapan yang tepat waktu menjadi lebih menantang karena memerlukan tersedianya laporan keuangan yang telah diaudit dari semua entitas yang dikendalikan secara signifikan.

Pemerintah eropa harus bergerak cepat dan fleksibel. Fleksibilitas dan kapasitas untuk bertindak ini menciptakan peluang untuk meningkatkan dan membuat proses lebih efisien di masa depan. Misalnya, transformasi digital layanan publik termasuk dalam reformasi utama yang disetujui oleh pemerintah Portugal untuk periode 2020–2023, tetapi pandemi telah mempercepat transisi ini untuk sistem akuntansi yang lebih baik. Sistem akuntansi akrual harus memberikan informasi yang baik tentang efek jangka panjang dari keputusan dalam hal keuangan publik dan, yang penting, dampak antargenerasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Cohen, S., Rossi, F., Caperchione, E., & Brusca, I. (2020). (2021) Debate: If not now, then when? Covid-19 as an accelerator for public sector accrual accounting in Europe. *Public Money & Management*, 41(1), 10–12. DOI: 10.1080/09540962.2021.1834714

Pemerintah Nigeria mengungkapkan bahwa Pandemi COVID-19 telah menciptakan dampak besar seperti gangguan bisnis dan produksi, gangguan rantai pasokan, volatilitas di pasar ekuitas dan utang, berkurangnya pendapatan dan arus kas dan konsekuensi ekonomi lainnya juga memiliki implikasi akuntansi dan keuangan.. Ini telah mengganggu pergerakan orang dan barang di seluruh dunia, dan banyak tingkat pemerintahan memberlakukan pembatasan pada individu dan bisnis. Dampak yang dihasilkan pada pelaporan keuangan mungkin signifikan bagi banyak organisasi bisnis dan industri.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil prastudi melalui monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan dilingkungan Kemenkumham di masa pandemi Covid 19, dilihat masih adanya permasalahan terkait kesalahan pembebanan Belanja, belum optimalnya Penyajian Informasi dalam Catatan atas laporan keuangan, kurangnya pemahaman terkait bisnis proses dan keterbatasan Teknologi Informasi Di samping itu, temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019-2020 mengindikasikan bahwa masih adanya permasalahan dalam laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM.

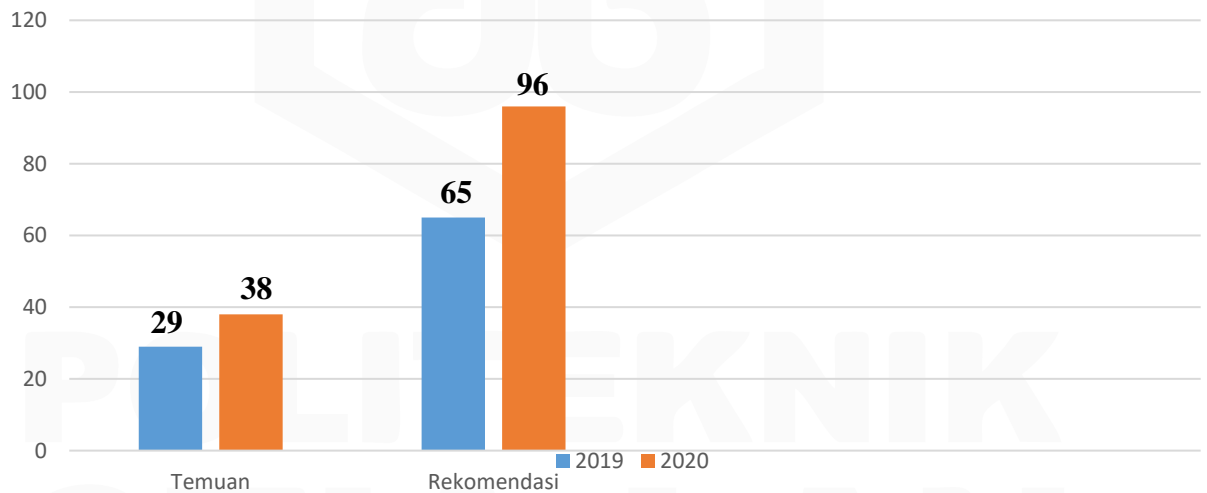
Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) pemeriksaan atas SPI meliputi pengelolaan risiko yang dimiliki entitas yang diperiksa, serta kecukupan atas pengelolaan risiko tersebut dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sementara pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kesesuaian antara pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. data LHP BPK atas LK Kementerian Hukum dan HAM periode 2019-2020 menunjukkan bahwa jumlah temuan pemeriksaan mengalami tren peningkatan, dimana jumlah temuan pada aspek SPI dan kepatuhan perundang-undangan pada tahun 2019 berjumlah 29 temuan dengan 65 rekomendasi dan pada tahun 2020 berjumlah 38 temuan dengan 96 rekomendasi. Bila diambil rata-rata dari total jumlah temuan pemeriksaan selama kurun waktu sebelum dan selama

---

<sup>6</sup> Raimi Adekunle Anisere-Hameed (2021), Effects Of Covid-19 Pandemic On Accounting And Financial Reporting In Nigeria

pandemi Covid 19, maka jumlah temuan SPI dan temuan kepatuhan memiliki presentase yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelum pandemi Covid 19 yaitu sebesar 31% dengan rekomendasi sebesar 48% dari total seluruh temuan pemeriksaan.

**Gambar 1.2**  
**Rekapitulasi Jumlah Temuan Pemeriksaan BPK RI**  
**Pada Kemenkumham Tahun 2019 - 2020**



Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan RI

Disamping itu aspek SPI merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan negara, hal tersebut dibuktikan bahwa pelaksanaan Pengendalian intern perlu dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Secara umum, permasalahan SPI yang terdapat pada laporan keuangan

Kementerian Hukum dan HAM juga terjadi pada tingkat LKPP. Berdasarkan LHP BPK pada aspek SPI periode pemeriksaan tahun 2019-2020 pada LK Kementerian dan LKPP adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Temuan Pemeriksaan SPI oleh BPK RI**  
**Pada LKPP dan LK Kemenkumham Tahun 2019-2020**

No	Periode Pemeriksaan	LKPP	LK Kemenkumham
1	2019	1. Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi pengalokasian pendanaan pengadaan Tanah pada Pos Pembiayaan masih sama dengan TA 2018 mengakibatkan LKPP Tahun 2019 belum menggambarkan informasi belanja dan deficit sesungguhnya	1. Kemenkumham belum menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait Permasalahan tanah secara optimal 2. Pengadministrasian Aset Tanah kemenkumham belum tertib
2	2020	1. Pemerintah belum menyusun mekanisme pelaporan Kebijakan Keuangan Negara untuk menangani pandemi Covid 19 pada laporan keuangan pemerintah pusat dalam rangka implementasi pasal 13 undang undang nomor 2 tahun 2020;  2. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban belanja diluar program PC-	1. Penatausahaan Persediaan pada beberapa Satker kemenkumham belum tertib 2. Penatausahaan Aset tak berwujud (ATB) pada beberapa Satker kemenkumham belum tertib; 3. Kelebihan Pembayaran atas Jasa dan Denda layanan yang belum disetor ke Kas Negara 4. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin belum sesuai ketentuan

		PEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp15,58 Triliun belum sesuai ketentuan	
--	--	--	--

( Diolah dari LHP LKPP dan LHP Kemenkumham tahun 2019-2020 ).

Berdasarkan tabel di atas, temuan pemeriksaan SPI yang terjadi khususnya pada Kemenkumham adalah permasalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan di masa Pandemi Covid 19 . Hal ini tentunya memerlukan perbaikan, dimana masih terdapat indikasi penyusunan LK belum optimal yang mengakibatkan berkurangnya kualitas Laporan Keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif, yakni sebagaimana termaktub dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai Instruksi tentang Pedoman Pengesahan Revisi Anggaran Refocussing dan Realokasi Kegiatan dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menindaklanjutinya dengan memangkas anggaran untuk dialihkan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut tentunya akan berdampak terhadap laporan keuangan pemerintah.<sup>7</sup>

Sesuai data yang didapat dari aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan LK Kementerian Negara/ Lembaga ( E-Rekon LK ) yang sudah terpublikasi bahwa kualitas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 masih terdapat permasalahan dan Satuan kerja yang masih terdapat masalah/ transaksi dalam konfirmasi (TDK) meningkat dibandingkan Tahun sebelumnya. Berikut tabel Kualitas Profil Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2019 dan 2020 :

---

<sup>7</sup> Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 (Audited)

**Tabel 1.2**

PROFIL KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020				
DARI E-REKON LK KEMENTERIAN KEUANGAN				
2019				
No	Jenis Transaksi	Jumlah Baris Beda	Nilai Netto Beda	Jumlah
1	Transfer Keluar/Masuk	12	59,499,542,372	59,499,542,372
2	Resiprokal BLU	1	149,484,600	149,484,600
3	Reklasifikasi Keluar/Masuk	5	24,175,929,103	24,175,929,103
4	Rekon SP2D Bel. Modal	71	-18,892,636	18,892,636
5	Rekon GL VS BMN	67	-6,774,158,540	6,774,158,540
<b>TOTAL</b>		<b>156</b>		<b>90,618,007,251</b>
2020				
No	Jenis Transaksi	Jumlah Baris Beda	Nilai Netto Beda	Jumlah
1	Transfer Keluar/Masuk	11	-2,116,902,645	2,116,902,645
2	Reklasifikasi Keluar/Masuk	8	20,039,511,641	20,039,511,641
3	Rekon SP2D Bel. Modal	27	-14,459,723,100	14,459,723,100
4	Rekon GL VS BMN	659	-21,549,596,384	21,549,596,384
5	Peng. Belanja Melebihi Belanja	4	20,145,000	20,145,000
<b>TOTAL</b>		<b>709</b>		<b>58,185,878,770</b>

Sumber : Kementerian Keuangan tahun 2019-2020<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil telaah dari E-Rekon LK yang tertera pada Tabel dengan penjelasan sebagai berikut :

**Permasalahan E-Rekon :**

1. Salah Pembebanan Belanja modal peralatan dan mesin membentuk akun belanja Sewa/ persediaan
2. Salah pembelian barang persediaan penanganan covid yang menggunakan akun
3. belanja gedung dan bangunan dan tidak dapat dicatat di aplikasi SIMAK-BMN
4. Salah akun belanja persediaan berupa biaya pengiriman masker dan alat rapid test
5. Salah Pembebanan Belanja Persediaan menghasilkan Aset

**Selisih Rekonsiliasi GL BMN**

Monitoring GL BMN merupakan monitoring terhadap pencatatan persediaan

<sup>8</sup> Profil Kualitas E-Rekon LK Kementerian Keuangan. <https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/home>

dan aset dari sisi SAIBA dengan sisi SIMAK-BMN baik berupa KDP, aset intrakomptabel, dan aset ekstrakomptabel. Selisih disebabkan karena adanya perbedaan nilai persediaan atau aset antara SAIBA dengan SIMAK-BMN. akan berdampak pada penyajian catatan atas laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan tidak optimal. Penyajian dan penjelasan pada catatan atas Laporan Keuangan dalam proses pengambilan keputusan pemangku kepentingan sangat berarti.

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan pengendalian yang spesifik dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan sudah andal dan sesuai dengan akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan PIPK sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.<sup>9</sup>

Berdasarkan Berdasarkan hasil reuiu Tim APIP Kementerian Hukum dan HAM atas Laporan Keuangan Tahun 2020 yang disajikan dalam Catatan Hasil Reuiu Inspektorat Jenderal masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan yaitu Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Kementerian Hukum dan HAM kurang optimal karena dilakukan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reuiu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat.

Dimasa awal pandemi covid-19, kebutuhan penanganan pandemi COVID-19 yang bersifat darurat dan mendesak serta adanya perubahan harga barang di pasaran yang meningkat drastis dari harga normal menjadi salah satu penyebab dalam rangka melaksanakan anggaran dalam rangka penanganan pandemic covid-19. Selain itu juga adanya beberapa perubahan penyesuaian akun belanja dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Barang Milik

---

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan (2021), Internalisasi PIPK Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Negara (BMN) karena pada saat pandemi banyak operator SAIBA maupun SIMAK BMN yang terpapar virus Covid 19 sehingga mengakibatkan banyaknya kesalahan penggunaan akun belanja dan belum optimalnya kualitas Laporan Keuangan.

Dalam masa pandemi terdapat perubahan prioritas belanja negara termasuk juga belanja modal terkait perolehan aset tetap, dan dampak paling besar terjadi pada pekerjaan atas konstruksi gedung dan bangunan. banyak anggaran yang pada masa pandemi ini jadi beralih prioritasnya menjadi fokus pada meminimalisir penyebaran virus covid19. hal tsb tentu menjadi catatan tersendiri dan perlu dilakukan pengungkapan yang memadai karena dgn adanya peralihan anggaran (refocussing anggaran), pada sisi pengelolaan khususnya penatausahaan BMN juga perlu dilakukan penyesuaian, baik dari perencanaannya maupun realisasi pelaksanaannya.

Teknologi informasi merupakan salah satu sarana pendukung dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan. Akuntansi pemerintahan berbasis akrual sulit dibayangkan dapat berhasil diterapkan apabila tidak dibantu dengan teknologi informasi yang memadai. Dengan jumlah transaksi dan satuan kerja yang banyak, adanya pencatatan dan pelaporan pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta proses konsolidasi yang rumit maka diperlukan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi.

Dengan adanya berbagai kebijakan pembatasan aktivitas, seperti pembagian shift dan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi sebagian instansi/organisasi. Transformasi digital akan sangat diperlukan terutama untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi antar anggota tim dalam upaya mencapai target pekerjaan yang telah di tentukan, ya tentu saja karena semua serba digital, aktivitasnya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun<sup>10</sup>

Oleh karena itu kurangnya sarana untuk menyimpan dokumentasi arsip/berkas-berkas keuangan secara digital juga menjadi kendala dalam hal untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu.

---

<sup>10</sup> Pahami Manfaat Transformasi Digital di Tengah Pandemi, <https://integrasolusi.com/blog/pahami-manfaat-transformasi-digital-di-tengah-pandemi/>

Berdasarkan Berdasarkan hasil reuiu Tim APIP Kementerian Hukum dan HAM atas Laporan Keuangan Tahun 2020 yang disajikan dalam Catatan Hasil Reuiu Inspektorat Jenderal masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dan perbaikan yaitu Penyajian dalam laporan keuangan belum optimal agar Pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 wajib disajikan secara memadai dalam CaLK (Pasal 15 PMK Nomor 43/PMK.05/2020).

Laporan keuangan pemerintah berada pada siklus pengelolaan keuangan negara, perannya amat vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan pemerintah adalah media pemotret proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang rakyat. Mulai dari direncanakan, dianggarkan, sampai dibelanjakan, serta pengawasannya. Untuk itulah perlu adanya peningkatan peranan Laporan Keuangan dalam penyusunan siklus pengelolaan keuangan negara. Manfaat dari Laporan Keuangan sebagai sarana evaluasi kinerja dapat menjadi salah satu entry point untuk dapat meningkatkan peranan Laporan Keuangan.<sup>11</sup>

Dengan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masa Pandemi Covid 19 untuk menggali seluruh potensi sumber daya yang ada dalam Penyusunan Laporan Keuangan, sehingga selain meningkatkan kualitas laporan keuangan juga sebagai persiapan menghadapi kondisi di masa yang akan datang .

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dan data pendukung permasalahan yang digambarkan terkait penyusunan laporan keuangan saat ini, dapat dilakukan identifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

---

<sup>11</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-seagai-wujud-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-negara.html>

- Kementerian hukum dan HAM;
2. Belum optimalnya Sumber daya Manusia/ Penyusun Laporan Kementerian hukum dan HAM;
  3. Belum optimalnya sistem informasi sebagai sarana pendukung menyusun Laporan keuangan hukum dan HAM;
  4. Belum optimalnya penyajian pengungkapan yang memadai terhadap transaksi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
  5. Belum optimalnya Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian hukum dan HAM.

### **C. Rumusan Permasalahan**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Mengapa penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM di masa Pandemi Covid- 19 belum optimal?
2. Bagaimanakah solusi Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian masalah terkait penyusunan Laporan Keuangan di masa pandemi COVID-19 dan setelah Pandemi berakhir ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Ada dua hal yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk:

1. Menganalisis penyebab belum optimalnya penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM di masa Pandemi Covid- 19.
2. Melakukan analisis solusi terkait penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM di masa Pandemi Covid- 19.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan teori yang dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian/Lembaga.

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para Penyusun laporan keuangan sebagai salah satu pedoman dalam menyusun laporan keuangan Kementerian/Lembaga di Masa Pandemi.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A